

KONDISI DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2009

Oleh : Marsuki

Disampaikan dalam Acara Talk Show PT BPR Hasa Mitra.

Makassar, 15 November 2008.

KONDISI DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2009¹

Oleh : Marsuki

Banyak pihak tidak menyangka bahwa diperempat bulan akhir tahun 2008, tepatnya mulai tanggal 7 Agustus 2008 tiba-tiba perekonomian dunia mengalami goncangan hebat akibat runtuhnya struktur pasar keuangan, dimulai dari negara adi daya ekonomi Amerika Serikat. Kemudian menyebar luas di hampir semua negara Eropa, Asia Pasifik, kemudian Asia, termasuk Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim bahwa kondisi ekonomi Indonesia menjelang tahun 2009 dan selama tahun 2009 nanti akan memasuki tahap pembangunan ekonomi yang semakin baik. Persepsi itu didasarkan pada perkembangan beberapa indikator ekonomi makro hingga akhir kuartal II tahun 2008. Seperti pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen, inflasi satu digit, jumlah pengangguran dan kemiskinan terus berkurang, meski kegiatan investasi relatif rendah akibat gejolak kenaikan harga minyak dunia yang cukup fantastis. Apalagi saat itu tampaknya perkembangan pasar modal berprospek positif, serta membaiknya beberapa harga komoditas primer Indonesia yang sempat berdampak positif pada pendapatan pelaku ekonomi domestik, kecil, menengah dan besar yang bergerak diusaha komoditas tersebut.

Tapi rupanya segalanya itu hanya merupakan titik kulminasi terbaik perekonomian Indonesia sejak krisis 10 tahun lalu. Karena ternyata, kondisi perekonomian riil bangsa ini masih rapuh, dimulai karena hantaman krisis di sektor pasar modal yang bisa dikatakan peranannya di Indonesia belum besar dan mapan, tapi ternyata telah mengakibatkan sendi-sendi perekonomian nasional yang dianggap baik, jeblok dan telah mulai mengakibatkan rentetan peristiwa krisis yang menyebar luas diberbagai sektor ekonomi. Sehingga jika setiap pelaku ekonomi dan bisnis utama tidak melakukan langkah-langkah sistematis dan terstruktur, kondisi ini akan berdampak lebih buruk dibanding krisis tahun 1997/1998 lalu.

Syukur, pemerintah Indonesia cepat melakukan rerspon terhadap perkembangan kondisi perekonomian global yang tidak menentu tersebut, dengan melakukan beberapa strategi praktis dengan menyertakan beberapa pihak pelaku yang secara langsung terlibat atau merasakan dampak krisis yang terjadi. Seperti Bank Indonesia, Perbankan, Asosiasi dunia usaha, Pemerintah Daerah dan beberapa pihak kompeten lainnya. Hasilnya, pemerintah sejak awal telah menetapkan dan mendeklarasikan sepuluh langkah guna menangani dampak krisis bagi perekonomian nasional, yang harus diusahakan dicapai, disertai dengan beberapa instrumen kebijakan bersifat dinamis, sesuai kebutuhan dan keadaan yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait secara bertanggungjawab dan terkoordinasi.

¹ Disampaikan dalam Acara Talk Show PT BPR Hasa Mitra : Kondisi dan Outlook Perekonomian Indonesia 2009. Makassar, 15 November 2008.

Kesepuluh langkah tersebut meliputi : 1. Mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah memperoleh komitmen pembiayaan dari luar negeri; 2. Menjaga kesinambungan APBN setelah mendapat persetujuan DPR; 3. Pemerintah bersama BI melakukan pembelian SUN di pasar sekunder; 4. Mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valasnya di bank dalam negeri; 5. Menginstruksikan BUMN untuk tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank karena alasan tidak jelas; 6. Menyediakan fasilitas diskonto wesel ekspor with resources; 7. Mengurangi pungutan ekspor CPO menjadi nol persen dari sebelumnya 2,5%; 8. Menerbitkan ketentuan tentang importasi komoditas tertentu. Seperti garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak dan sepatu serta menetapkan pelabuhan-pelabuhan tertentu yakni Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Bandara Sukarno Hatta, Pelabuhan Makassar dan Bandar Juanda; maupun memanfaatkan bilateral swap arrangement dari Bank of Japan, Bank of Korea dan bank of China apabila diperlukan; serta 10. Membentuk task force terpadu antara instansi terkait.

Berbagai upaya tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dilaksanakan dengan menggunakan beberapa instrumen kebijakan yang terus dipantau efektifitas pelaksanaannya. Diantaranya : 1. Tanggal 4-9 Oktober 2008, Depkeu menempuh upaya untuk menambah likuiditas perbankan pemerintah; 2. Tanggal 7 Oktober 2008, Depkeu tidak menambah suplai SUN di pasar; 3. Tanggal 9 Oktober 2008, Depkeu melakukan relaksasi ketentuan pembelian saham kembali (Buy back), kemudian Depkeu dan kementerian BUMN membeli Saham BUMN; 4. Tanggal 13 Oktober 2008, BI menerbitkan aturan PBI sebagai kebijakan untuk menjaga kecukupan likuiditas Rupiah dan valas; 5. Tanggal 15 Oktober 2008, BI menerbitkan PBI untuk kebijakan pelonggaran likuiditas Rupiah dan valas (penyesuaian GWM, perpanjangan waktu swap, penyesuaian ketentuan terkait PLN, penyesuaian ketentuan FPJP dan pengaturan transaksi pembelian valas); Selain itu Pemerintah dan BI menerbitkan Perpu tentang jaring pengaman sistem keuangan; serta menerbitkan Perpu mengenai Amandemen UU BI ; Juga diterbitkannya Perpu mengenai LPS; Dan kemudian, tanggal 1 dan 15 Desember, Pemerintah mengambil kebijakan penurunan harga BBM dan solar.

Sebahagian kelompok menganggap bahwa secara umum berbagai upaya pemerintah beserta pelaku ekonomi lainnya itu telah memberi sinyal positif kepada para pelaku ekonomi umumnya karena krisis yang terjadi telah disikapi secara cepat oleh pemerintah. Dampaknya, mulai terbangun rasa kepercayaan yang baik dari para pelaku ekonomi. Meskipun diakui bahwa hasilnya memang belum optimal, namun dampak positifnya sudah mulai dapat dirasakan dalam jangka pendek ini.

Tapi oleh pihak lainnya menganggap meskipun begitu besar upaya yang dilakukan selama ini oleh pemerintah beserta pihak terkait lainnya, hal itu masih tetap disangsikan dampak positifnya dalam kurun jangka menengah, terutama selama tahun 2009 nanti. Sebab mereka menganggap bahwa dampak nyata dari krisis yang sedang terjadi selama ini justru baru akan mulai terasa secara mendasar pada awal tahun sampai akhir tahun 2009 nanti.

Sehingga diharapkan oleh pihak kritis agar pemerintah dan pihak-pihak terkait selalu harus bersama seiring untuk mengerti dan menindaklanjuti perkembangan krisis yang akan terjadi. Hanya masalahnya selama periode 2009 tersebut merupakan periode pemilu politik, sehingga harapan seperti itu mungkin akan sulit terealisasi. Alasannya karena selama periode itu mungkin pertimbangan kepentingan politik masing-masing

pihak untuk memenangkan pemilu akan dapat menjadi penghalang utama. Sehingga saat itulah akan diuji tingkat kenegarawanan para politisian bangsa ini, apakah mereka akan mementingkan kepentingan pribadi dan golongan atau kepentingan rakyat dan negara.

Dalam kondisi yang sedemikian besar ketidakpastiannya, karena spektrum wilayah masalahnya sangat tidak terbatas, maka jelas merupakan sesuatu yang sulit untuk memprediksi secara akurat bagaimana kondisi perkembangan perekonomian Indonesia tahun 2009 nanti. Namun demikian, prediksi kasar dan terbatas tentu tetap dapat dilakukan berdasarkan gejala dan perkembangan dan perilaku dari beberapa indikator dan pelaku ekonomi dan bisnis dalam waktu-waktu terakhir ini.

Yang jelas bahwa dengan kondisi yang ada, kegiatan sektor riil sudah mulai terimbas krisis. Sehingga akibatnya, diantaranya diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh lambat, mungkin hanya dalam kisaran 5-5%. Sebagai akibat adanya beberapa masalah di jalur output dan jalur keuangan. Misalnya di jalur output, masalah bersumber dari daya beli masyarakat menurun tercermin dengan menurunnya sumbangan penentu utama PDB yakni konsumsi rumah tangga; realisasi investasi menurun karena ketidakpastian usaha; nilai ekspor migas dan non migas akan berkurang karena harga komoditas dunia turun dan ekonomi negara partner akan semakin terproteksi.

Sedangkan di jalur keuangan, masalah itu tercermin dari akan masih tidak pastinya kondisi pasar keuangan, pasar modal dan pasar uang, tercermin akan sulitnya meningkat nilai IHSG di BEI; sektor perbankan akan lebih konservatif sehingga kemungkinan akan melambatnya penyaluran kredit perbankan; dan terjadinya perebutan likuiditas Rupiah dan USD yang tidak rasional oleh para pelaku ekonomi dan bisnis sehingga akan membuat posisi nilai tukar rupiah masih dalam kisaran Rp. 11.500-Rp.12.000 per USD.

Dampak berantai dari keadaan yang terjadi tersebut yang mungkin tidak dapat dihindari, akan meningkatnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan mengakibatkan semakin meningkatkan jumlah orang miskin baik di kota dan terutama di pedesaan. Terutama atas dua masalah ini tidak dapat dibiarkan terjadi, karena biaya sosialnya akan sangat mahal bagi kepentingan pembangunan ekonomi bangsa selanjutnya.

Namun demikian sebenarnya ada beberapa hal yang dapat menjadi harapan, agar kondisi berat tersebut dapat dilalui, walaupun masih dengan beberapa pengorbanan. Diantaranya, akan adanya kecendrungan deflasi atau penurunan inflasi, sebagai akibat turunnya harga minyak dunia atau di Indonesia harga BBM dan solar. Hal ini memungkinkan besarnya peluang bank sentral BI akan dapat menurunkan lagi suku bunga BI ratenya, dalam kisaran 8-8,5%, sehingga memungkinkan memacu meningkatnya fungsi intermediasi perbankan untuk membelanjai sektor ekonomi riil.

Namun segalanya itu akan lebih baik jika pemerintah dan pelaku ekonomi lainnya atau pengusaha khususnya dapat menempuh kebijakan-kebijakan ekonomi lebih khusus, lebih terencana dan bersifat fundamental sekurang-kurangnya untuk tujuan jangka pendek dan menengah, disamping kebijakan-kebijakan parktis yang telah dan sedang dilakukan selama ini.

Misalnya dari sisi pemerintah dapat melakukan : 1. Perlunya memperkuat resiliansi perekonomian domestik, diantaranya berusaha mengoptimalkan peran perekonomian di

daerah-daerah yang mempunyai produk-produk unggulan, khususnya sektor agro, pangan dan energi; kemudian meningkatkan potensi konsumsi masyarakat terhadap produk-produk domestik; penurunan atau kompenasasi pajak untuk produk dan kegiatan barang-barang yang dibutuhkan pasar domestik, serta mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di daerah. 2. Mempercepat implementasi untuk mendorong kebijakan sektor riil, diantaranya perlunya dukungan keuangan untuk produk komoditas ekspor, rasionalisasi berbagai iuran, retribusi dan pajak di pusat dan daerah, perlindungan pasar dalam negeri sesuai mekanisme di WTO, maupun upaya menekan biaya logistik di pelabuhan yang masih tinggi. 3. Perlunya menjaga ketahanan sektor keuangan, khususnya perbankan, terutama dengan memberi tanggungjawab lebih besar ke BI untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah likuiditas perekonomian. Diantaranya BI diharapkan dapat menurunkan suku bunga BI ratenya jika sudah memungkinkan, perlunya lembaga LPS menyesuaikan kemampuan penjaminannya, dan perlunya pemerintah melalui BI membantu agar perbankan pemerintah (BUMN) khususnya dapat membiayai proyek-proyek prioritas, khususnya infrastruktur listrik, jalan dan pengairan, dan sebagainya.

Sedangkan dari sisi pengusaha, mereka dapat mencari peluang dan target pasar baru. Seperti : 1. Mengoptimalkan pasar domestik dengan mengeksplote potensi pasar domestik, menyesuaikan atau mengubah produk agar sesuai dengan pasar lokal atau mencari alternatif produk/bahan baku impor dari supplier lokal. Selain itu, mencari pasar ekspor yang lain, dengan cara mengalihkan ekspor ke negara/kawasan lain seperti Timur Tengah, Cina dan India, serta mencari peluang ekspor ke negara dengan stimulus fiskal yang besar seperti China. 2. Berupaya mengurangi utang dan melepas aset non produktif, dengan cara mengurangi atau mereskedul ekspansi usaha yang didukung eksternal financing, memaksimalkan sumber keuangan internal, menegosiasi kontrak impor untuk mengkompensasi pelemahan rupiah, melepas asset yang tidak produktif untuk menjaga cashflow atau melakukan efisiensi guna mencegah pengurangan karyawan.

Akhirnya, harus diakui bahwa krisis kali ini merupakan krisis yang cukup berat dibanding krisis keuangan tahun 1997/1998, karena spektrumnya sangat luas, melibatkan hampir semua pelaku terutama di negara-negara maju partner ekonomi, dagang atau bisnis Indonesia selama ini. Sehingga penanganannya lebih tidak mudah. Memerlukan strategi atau langkah-langkah yang komprehensif. Khusus pemerintah Indonesia perlu memfokuskan langkah-langkah strategisnya dengan menyertakan peran pelaku pemerintah daerah, dunia usaha dan sektor perbankan secara bersama-sama untuk mengatasi krisis yang dihadapi dengan menerapkan strategis pragmatis dan fundamental guna menggerakkan perekonomian domestik sesuai kekuatan ekonomi daerah dengan memanfaatkan kekayaan SDA potensial agro dan energi, SDM yang murah dan pasar yang sangat luas.